

# PERMENPANRB 20/2018 PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH

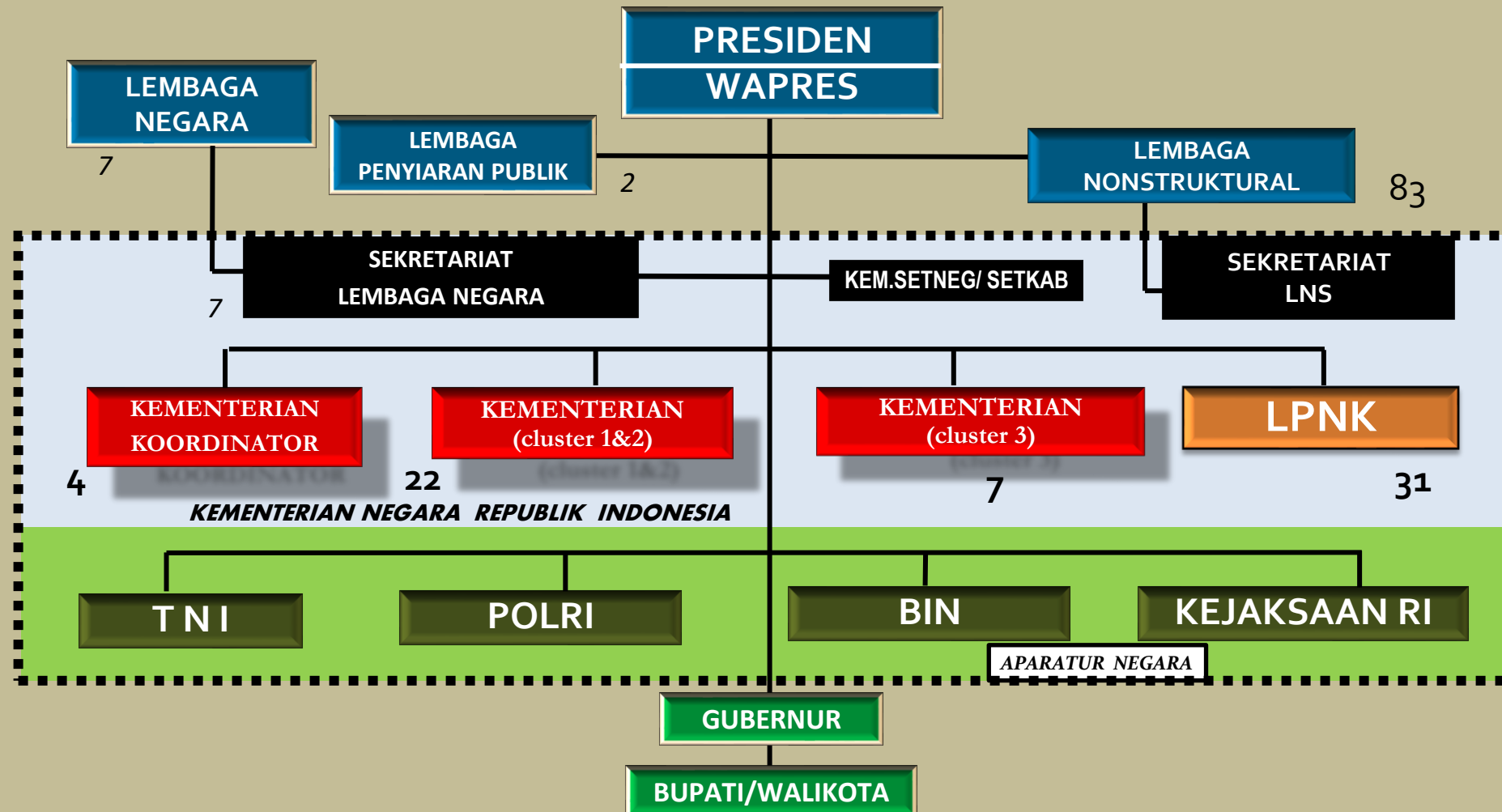
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan  
Pemerintah Daerah

Kamis, 19 MEI 2022



# PETA KELEMBAGAAN

## PETA KELEMBAGAAN PEMERINTAH



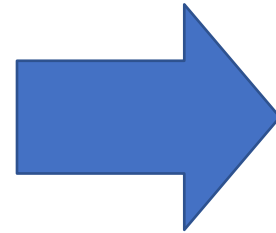
# 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Presiden 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

PermenPANRB 25/2020 ttg Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Road Map terakhir dari Grand Design RBN untuk menghasilkan karakter birokrasi kelas dunia dengan ciri pelayanan publik makin berkualitas dan tata Kelola makin efektif dan efisien



# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA (RPJMN 2020-2024)



## PENATAAN KELEMBAGAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

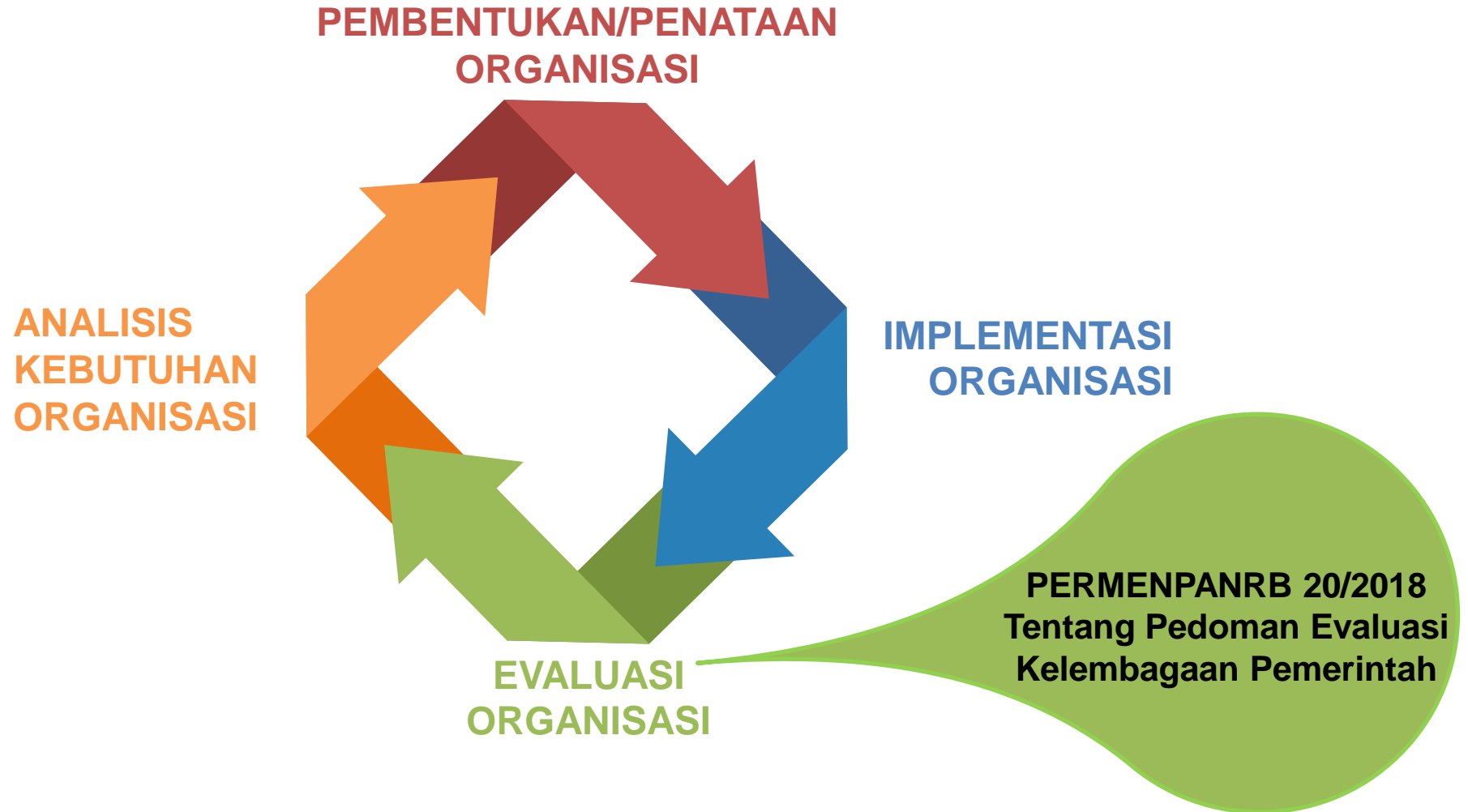


Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Instansi Pemerintah

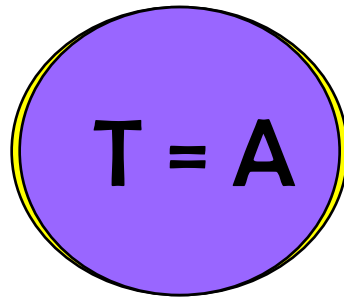


Penerapan SPBE yang terintegrasi

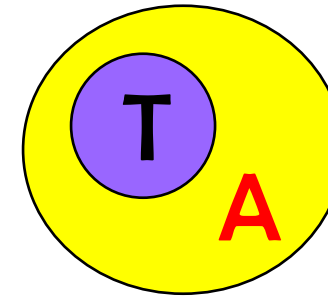
# SIKLUS ORGANISASI



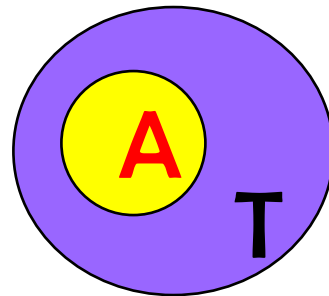
# EVALUASI ORGANISASI



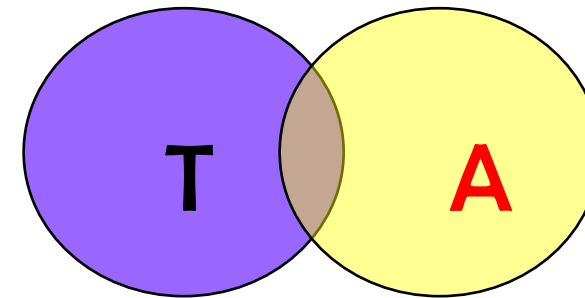
Ideal/match



progressive/over-active



under capacity



mismatch

Ket:

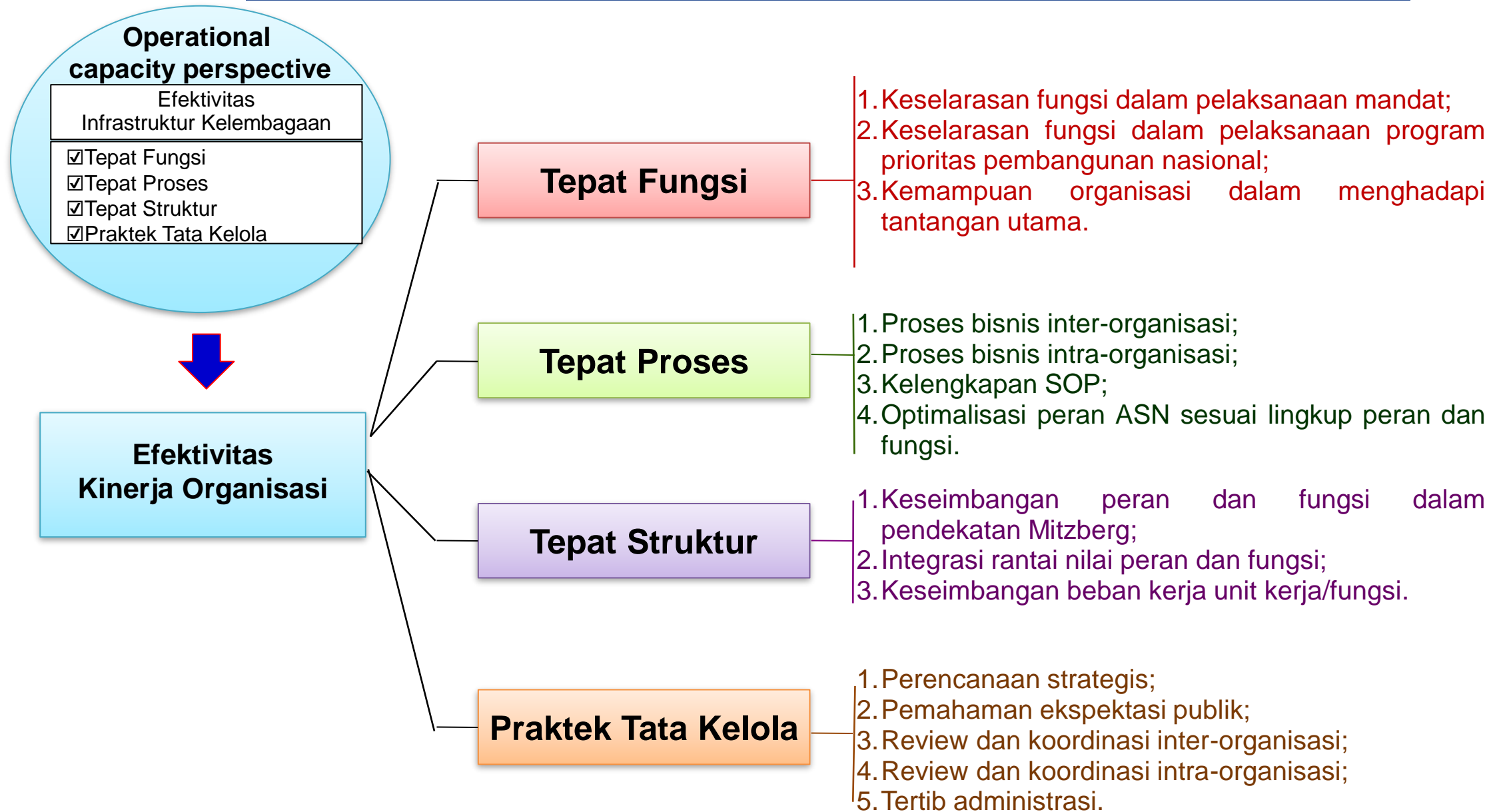
T : Target

A : Activity





# KERANGKA DIAGNOSIS EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI



# LANDASAN PEMIKIRAN

mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran

- UU 23/2014
- PP 18/2016



PERMEN PANRB

67/2011 -> 20/2018

merupakan **acuan** bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien

- **wajib** melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah
- dilaksanakan **paling singkat 3 (tiga) tahun sekali**
- **Bertahap** -> meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi
- Hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah **disampaikan** kepada Menteri
- Menteri melaksanakan **verifikasi** hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Evaluasi





# RUANG LINGKUP EVALUASI

## STRUKTUR

01

- **Kompleksitas**  
(horizontal, Vertikal, Spasial).
- **Formalisasi**  
aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan (konsistensi dan koordinasi).
- **Sentralisasi**  
kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi.

02

## PROSES

- **keselarasan(alignment)**  
antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi.
- **tata kelola (governance) dan kepatuhan (compliance)**  
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (fairness).
- **perbaikan dan peningkatan proses**  
relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (value chain).
- **manajemen risiko**  
meminimalkan, memantau, dan mengendalikan dampak negatif.
- **teknologi informasi**  
integrasi, dan interoperabilitas.

# INDIKATOR EVALUASI

## Dimensi

## Sub-dimensi

## Indikator

30

### Struktur

Idealnya struktur perangkat daerah bersifat dinamis dan fleksibel

Kompleksitas

4

Formalisasi

6

Sentralisasi

1

### Proses

Proses organisasi berperan dalam berlangsungnya aktivitas organisasi

Keselarasan

5

Tatakelola dan Kepatuhan

7

Perbaikan dan Peningkatan Proses

2

Manajemen Resiko

2

Teknologi Informasi

3

# METODE EVALUASI



## SURVEI

**survei** berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator



## POPULASI

seluruh unsur penyelenggara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau selanjutnya disebut sebagai instansi pemerintah.



## KUESIONER

**Kuesioner** digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data



## SAMPEL

dua tingkatan organisasi, yakni tingkatan tertinggi organisasi dan satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi



## MULTILEVEL

- Organizational wide level
- Sub-organization wide level



## RESPONDEN

**tim** yang ditugasi oleh masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan tingkatan organisasinya untuk mengisi kuesioner yang diberikan.

# TAHAPAN EVALUASI

## 01 Persiapan

- penetapan tim pelaksana evaluasi
- Anggota tim harus memiliki wawasan memadai dan kemampuan analisis organisasi secara tajam, komprehensif, dan sistematis.
- Jumlah anggota Tim Evaluasi Kelembagaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi

## 02 Pengumpulan Data

- penyebaran kuesioner (hardcopy, softcopy, online)

## 03 Analisis Data

- menilai isi kuesioner (66 pertanyaan) dengan **pembobotan**
- melakukan analisis terhadap jawaban dari **pertanyaan terbuka** sebagai pembanding dari hasil jawaban terhadap kuesioner (tim verifikasi)
- 4 (empat) opsi jawaban berdasarkan skala Likert dengan nilai (skor) dari 1 sampai 4
- besaran bobot untuk masing-masing dimensi

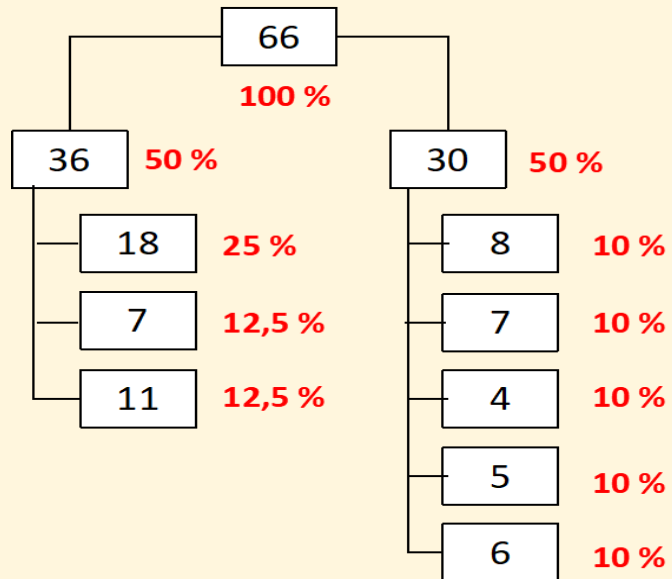
## 04 Laporan Evaluasi

- Pendahuluan
- Analisis
- Penutup



No.	Tahapan	Kegiatan Evaluasi Kelembagaan instansi Pemerintah	Durasi Waktu
1	Persiapan	Persiapan pembentukan tim pelaksana pada masing-masing instansi pemerintah	5 hari kerja
2	Pengumpulan data dan informasi	Pengumpulan kelengkapan informasi/data pendukung pengisian kuesioner	10 hari kerja
3	Pengolahan dan analisis data	Pengisian kuesioner dan analisis data	14 hari kerja
4	Penyampaian laporan evaluasi	Tim menyampaikan laporan evaluasi kepada Kementerian PANRB	1 hari kerja

## 1 Bobot Penilaian



## 2 Konversi Nilai

Tabel 8  
Nilai Subdimensi Keselarasan

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 8	1	2	3	4	10% dibagi 8 = 1,250
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,313	0,625	0,938	1,250	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

## 3 Pengategorian dan Penyajian Hasil Evaluasi

### 3.1. Peringkat Komposit

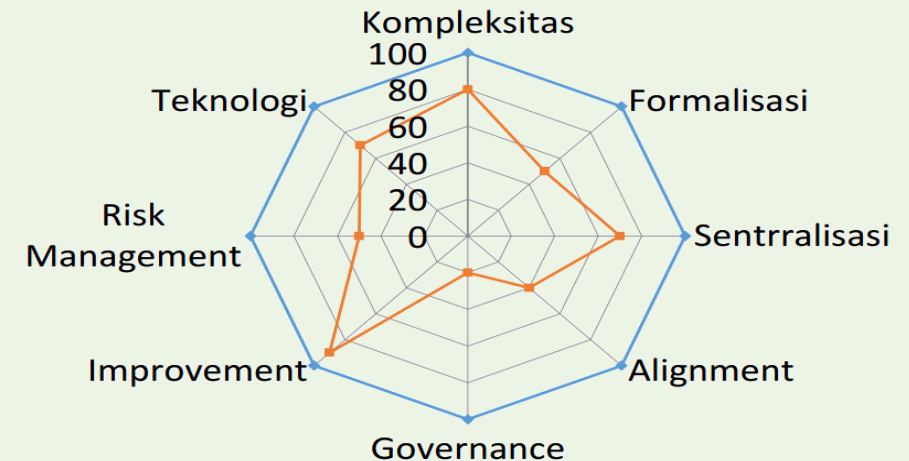
menyajikan interpretasi terhadap hasil total skor dalam 5 (lima)

skor	kategori
81-100	P-5
61-80	P-4
41-60	P-3
21-40	P-2
0-20	P-1

- **Kondisi** Dimensi Struktur dan Proses
- **Kemampuan** akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal
- **Kekurangan/** kelemahan

### 3.2. Grafik Radar

memberikan informasi yang lebih analitis tentang kondisi organisasi



# PERINGKAT KOMPOSIT

PERINGKAT	KONDISI DIMENSI STRUKTUR DAN PROSES	KEMAMPUAN AKOMODASI KEBUTUHAN INTERNAL DAN ADAPTASI LINGKUNGAN EKSTERNAL	KEKURANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81 - 100	Sangat Efektif	Sangat Tinggi	-
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61 - 80	Efektif	Tinggi	Kelemahan Kecil
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41 – 60	Cukup Efektif	Mampu	Kelemahan Biasa
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21 – 40	Kurang Efektif	Kurang Mampu	Kelemahan Serious
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0 – 20	Tidak Efektif	Tidak Mampu	Kelemahan Sangat Serious

# INDIKATOR DIMENSI STRUKTUR



## KOMPLEKSITAS

1. Kompleksitas struktur organisasi.
2. Tingkat spesialisasi atau jabatan.
3. Tata hubungan antar spesialis atau pejabat.
4. Tingkat pembagian pelayanan berdasarkan tempat (daerah/wilayah).



## FORMALISASI

1. Tingkat kejelasan dan ketegasan “peraturan” mengenai pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja dan bagaimana cara kerjasamanya.
2. Tingkat kejelasan “prosedur kerja” secara praktis (langkah kerja yang berurutan secara logis dan terkait dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja).
3. Tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja.
4. Tingkat pembakuan proses kerja.
5. Tingkat pembakuan dimensi-dimensi produk (pelayanan) yang harus dihasilkan.
6. Tingkat pembakuan keterampilan kerja.



## SENTRALISASI

Tingkat keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau tingkat kejelasan “kebijakan kerja” sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja.



## KESELARASAN

1. Keterkaitan sasaran strategis organisasi dengan visi, tujuan dan misi organisasi.
2. Keterkaitan proses kerja dengan sasaran strategis organisasi.
3. Keterkaitan proses kerja dengan struktur organisasi.
4. Harmonisasi proses kerja secara vertikal dan horizontal.
5. Pendokumentasian proses kerja.



## TATA KELOLA & KEPATUHAN

1. Kesesuaian struktur organisasi dan tata kerja dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kejelasan pemetaan kepentingan dari para pemangku kepentingan yang terdapat di dalam struktur organisasi.
3. Transparansi informasi di dalam pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Akuntabilitas di dalam wujud kejelasan struktur, fungsi dan peran/tanggung-jawab.
5. Responsibilitas mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan.
6. Independensi setiap fungsi di dalam struktur sesuai dengan kewenangannya.
7. Perlakuan yang proporsional sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan peran setiap elemen di dalam struktur organisasi.



# INDIKATOR DIMENSI PROSES



## PERBAIKAN & PENINGKATAN PROSES

1. Evaluasi Metode Kerja.
2. Pembaharuan Metode Kerja



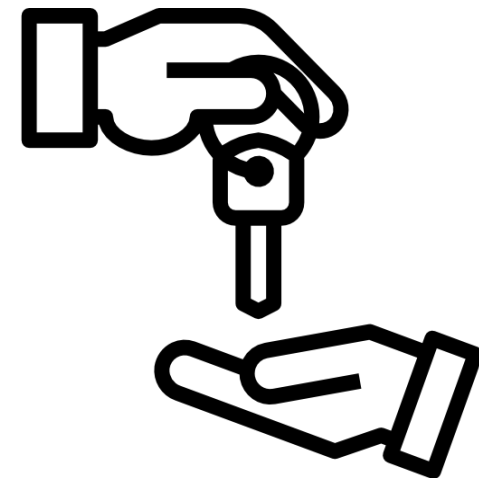
## MANAJEMEN RESIKO

1. Budaya Risiko.
2. Kematangan Penerapan Manajemen Risiko.



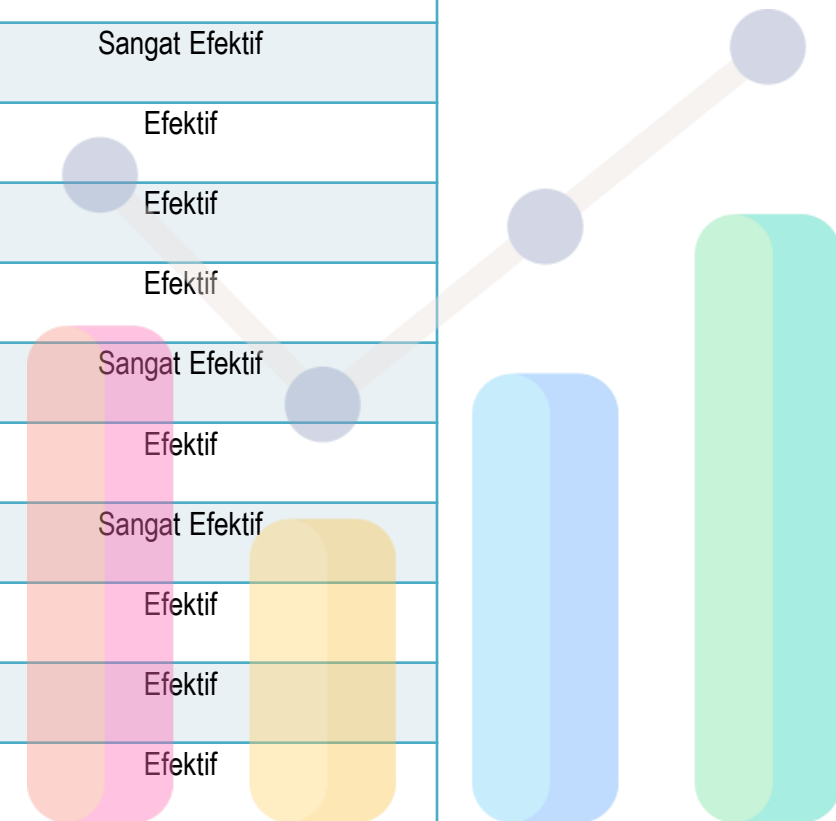
## TEKNOLOGI INFORMASI

1. Kecukupan Kebijakan Teknologi Informasi.
2. Rancangan Arsitektur Teknologi Informasi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.



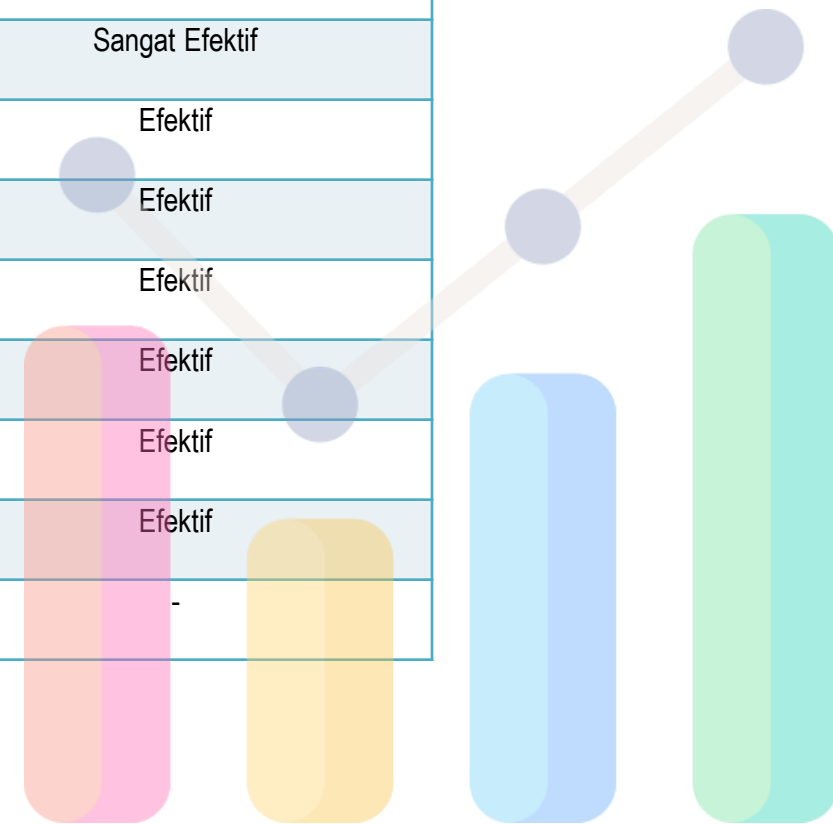
# HASIL VERIFIKASI/VALIDASI EVALUASI KELEMBAGAAN PADA K/L BIDANG POLHUKAM

No.	Kementerian/Lembaga	Evaluasi Kelembagaan		Peringkat Komposit	Keterangan
		Mandiri	Verifikasi/Validasi		
1	Kemenkopolhukam	59,20	72,58	(P4)	Efektif
2	Kementerian Pertahanan	67,78	78,06	(P4)	Efektif
3	Kementerian Hukum dan HAM	71,83	83,93	(P5)	Sangat Efektif
4	Kementerian PUPR	71,09	78,85	(P4)	Efektif
5	Lembaga Ketahanan Nasional	70,51	65,79	(P4)	Efektif
6	BNN	70,54	70,45	(P4)	Efektif
7	Badan Kepegawaian Negara	86,28	82,57	(P5)	Sangat Efektif
8	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	72,35	73,35	(P4)	Efektif
9	Mahkamah Konstitusi RI	86,02	82,33	(P5)	Sangat Efektif
10	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI	68,18	64,15	(P4)	Efektif
11	Sekretariat Ombudsman	72,63	80,13	(P4)	Efektif
12	Sekretariat Jenderal Komnas HAM	80,16	70,59	(P4)	Efektif



# HASIL VERIFIKASI/VALIDASI EVALUASI KELEMBAGAAN PADA K/L BIDANG POLHUKAM

No.	Kementerian/Lembaga	Evaluasi Kelembagaan		Peringkat Komposit	Keterangan
		Mandiri	Verifikasi/Validasi		
13	Sekretariat Jenderal KPU	67,67	70,61	(P4)	Efektif
14	Kejaksaan RI	74,87	60,46	(P4)	Efektif
15	Kementerian Desa PDTT	87,83	81,25	(P5)	Sangat Efektif
16	Badan Intelijen Negara	75,97	73,55	(P4)	Efektif
17	Badan Pengawas Pemilihan Umum	68,40	68,07	(P4)	Efektif
18	Kementerian Dalam Negeri	75,97	72,83	(P4)	Efektif
19	Dewan Ketahanan Nasional	68,74	77,40	(P4)	Efektif
20	Kementerian ATR/BPN	73,79	80,99	(P4)	Efektif
21	Mahkamah Agung	69,97	64,48	(P4)	Efektif
22	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	-	-



# Terima Kasih

